

WAKIL KEPALA DAERAH

Rekonstruksi
Peran Jabatan
& Efektivitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan

Dalam sejarah Pemerintahan Daerah, jabatan wakil kepala daerah hanya sebatas pelengkap bagi jabatan kepala daerah. Tugas utama wakil kepala daerah hanya sebatas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan tugasnya. Ketidakjelasan kewenangan tersebut menjadi salah satu faktor penting terjadinya disharmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jika isu kewenangan wakil kepala daerah dibiarkan lebih lanjut dikhawatirkan menjadi bola liar. Seperti banyak muncul ditataran ide dan gagasan untuk menghapus jabatan wakil kepala daerah. Dasar topik pembahasan tersebut dialami penulis dalam buku ini yang menyajikan dan mengkaji lebih mendalam terkait penguatan peran wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penulis menyoroti hal-hal pokok terkait: topik kedudukan dan peran wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemudian upaya penguatan peran jabatan wakil kepala daerah relevansinya dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.



DR. FIRDAUS ARIFIN, S.H., M.H., lahir di Metro Lampung 5 Februari 1982 adalah Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Tinggi (YPT) Pasundan Dpk Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Pendidikan Sarjana Hukum ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Pasundan pada tahun 2000 Program Kekhususan Hukum Tata Negara, kemudian pada tahun 2005 melanjutkan Pendidikan Magister Hukum di Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran BKU Hukum Tata Negara. Pada tahun 2019 mengikuti Program Doktor Ilmu

Hukum di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan BKU Hukum Tata Negara. Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan bidang Sumber Daya, Perencanaan, Keuangan dan Tehnologi Informasi di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Beberapa karya buku yang telah dipublikasikan antara lain: *Refleksi Reformasi Konstitusi 1998-2002 (Beberapa Gagasan Menuju Amandemen Kelima UUD 1945)*; *Penjabat Kepala Daerah, Ilmu Negara Kontemporer; Perkembangan Konsep, Teori dan Doktrin; Hak Asasi Manusia, Teori, Perkembangan dan Pengaturan; Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat; Sengketa kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi dan Hukum Tata Negara (Sebuah Pengantar)*.

ISBN 978-623-7416-66-1

